



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDARIAS SAMPE
2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
3. NHK : 447572

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah Seluas 444 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/120 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5G(F700RE-GMDFJ) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.701.360

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.654.201.360

III. HUTANG Rp. 173.603.227

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.480.598.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.